**EPISTEMOLOGI POLITIK EKONOMI ISLAM:
KAJIAN DALAM PEREKONOMIAN NEGARA**

Neni Hardiati, Chaerul Shaleh, Fauzan Ali Rasyid

Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: nenihardiati@gmail.com

***Abstract :** Correct understanding of the basic elements in Islamic political economy is a necessity for its development. This writing attempts to trace the conceptual understanding of the basic elements of science, including the views and epistemology of Islamic economic politics in a country. His position in constructing the methodology of Islamic political economy to become the main topic. So that there are differences in the aims of epistemology and the framework of the methodology of Islamic political economy with the West. The consequences of these differences lead to differences in science. At the practical level, this gives rise to differences in determining policies. Meanwhile, logic, coherence and consistency are important prerequisites for a scientific approach. Islamic economic politics must be studied through its own epistemological view. However, on the other hand, we cannot deny the role and position of political science and economics today in the process of developing Islamic political economy. The study of political-economic epistemology covers the role of the state in the economy, especially in terms of public policy.*

***Keywords:** Epistemology, Islamic Political Economy, State Economy*

1. PENDAHULUAN

Politik ekonomi Islam memberikan suatu konsep politik pengembangan ekonomi yang kompetitif. Kegiatan ini akan menjadi suatu prinsip dasar dalam politik ekonomi Islam yang di dalamnya seperti karakteristik serta tujuannya, dan strategi politik pembangunan ekonomi yang berlandaskan syariah. Namun hal itu tidak kalah pentingnya dalam politik ekonomi Islam terdapat dampak positif bagi sebuah negara agar percepatan ekonomi seperti dalam pemberdayaan UMKM yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Politik ekonomi Islam telah mengatur bahwasanya kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta hendaknya didasarkan kepada prinsip-prinsip maupun etika bisnis yang Islami. Oleh sebab itu, pada saat lembaga keuangan konvensional mengalami *collapse* sebagai imbas dari menggelembungnya suku bunga, kondisi ini justru menguntungkan untuk berbagai lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. (Junaidi & Zainuddin, 2017)

Aspek dari ekonomi Islam ialah desakannya dalam memasukkan nilai-nilai hukum serta etika terhadap bisnis maupun ekonomi. Sehingga nilai religious menjadi suatu pembeda ekonomi Islam dan konvensional. Menurut Abdurrahman al-Maliki, Politik ekonomi dalam Islam ialah untuk memenuhi seluruh kebutuhan primer pada setiap individu maupun kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Sehingga demikian, Islam memandang setiap orang secara individual, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Pertama, Islam memandang setiap manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya

secara menyeluruh. Kedua, Islam memandang sebagai individu tertentu yang berpeluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Asas politik ekonomi Islam menurut al-Maliki terdiri empat asas, yaitu: 1). Setiap orang secara individual perlu dipenuhi berbagai kebutuhannya; 2). Kebutuhan primer (*basic needs*) setiap manusia harus dipenuhi secara menyeluruh; 3). Usaha mencari rizki hukumnya mubah/ halal; 4). Nilai-nilai luhur harus mendominasi semua interaksi yang terjadi antar individu di tengah-tengah masyarakat. (Yasin, 2018)

Permasalahan ekonomi saat ini ialah jika tidak tercukupi kebutuhan pokoknya manusia sebagai individu di masyarakat. Barang serta jasa sebenarnya bisa mencukupi semua keperluan pokok kehidupan manusia. Namun karena distribusi barang yang tidak merata, sehingga akan selalu ditemukan masyarakat yang tidak mampu memenuhi keperluan pokoknya dengan layak. Dari persoalan ini sehingga kekacauan distribusi barang adalah permasalahan yang sebenarnya. Namun, upaya perbaikan terhadap permasalahan ini yakni dengan memperhatikan aspek pertumbuhan dan distribusi. Dalam mengatasi hal ini tersebut sehingga diperlukan sistem politik ekonomi yang bisa memberikan perhatian besar terhadap pertumbuhan aspek distribusi. Sehingga ekonomi dan politik berkaitan satu sama lain. (Irkhami, 2016)

Fokus dari ekonomi politik yakni fenomena ekonomi umum yang tidak bisa dipisahkan dengan negara masing-masing dalam menentukan sistem ekonomi. Sebab didunia ada dua aspek ekonomi besar yakni sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi yang terpusat maupun terencana dan kapitalis liberal yang lebih mengedepankan pada pasar. Kajian mengenai ekonomi politik sebenarnya tidak bisa terlepas dari masalah bagaimana menciptakan kemakmuran terhadap suatu negara. Sebab itu pada awalnya ilmu politik serta ilmu ekonomi menjadi satu bidang ilmu, yang dikenal dengan ekonomi politik, yakni pemikiran maupun analisa kebijaksanaan yang akan digunakan agar memajukan kekuatan kesejahteraan negara. Menciptakan kemakmuran merupakan bagian dari sebuah disiplin ekonomi. Sementara kebijakan serta strategi yang dilaksanakan negara menjadi wilayah kajian politik. (Fauroni, n.d.)

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode studi literatur, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah buku-buku, majalah ilmiah serta dokumen yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Tahapan penelitian yang dilakukan dalam studi pustaka ini yakni reduksi data berupa penyuntingan maupun meringkas sehingga didapatkan data utama inti tulisan, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013), melakukan verifikasi dan tinjauan ulang data yang didapat agar penarikan kesimpulan dilaksanakan mengenai epistemologi politik ekonomi Islam kajian pada perekonomian negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Epistemologi Politik Ekonomi Islam

Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme serta logos. Episteme memiliki arti pengetahuan dan logos adalah teori atau ilmu. Sehingga, epistemologi adalah sebuah ilmu yang mengkaji mengenai sumber pengetahuan maupun asal mula metode, struktur, serta valid tidaknya suatu pengetahuan. Sementara ekonomi Islam adalah suatu jaminan dalam terwujudnya dalam memenuhi setiap kebutuhan pokok dasar bagi setiap idividu secara menyeluruh. Namun, tidak mengabaikan seseorang dalam mencukupi kebutuhan sekunder serta tersiernya sebagai manusia yang hidup ditengah-tengah masyarakat. (Rozalinda, 2015)

Menurut Abdurrahman al-Maliki, Politik ekonomi Islam ialah untuk memenuhi seluruh kebutuhan primer pada setiap individu maupun kebutuhan-kebutuhan skundernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Dengan demikian, Islam memandang setiap orang secara individual, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Pertama, Islam memadamang setiap manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh. Kedua, Islam memandang sebagai individu tertentu yang berpeluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Asas politik ekonomi Islam menurut al-Maliki terdiri empat asas, yaitu: 1). Setiap orang secara individual perlu dipenuhi berbagai kebutuhannya; 2). Kebutuhan primer (*basic needs*) setiap manusia harus dipenuhi secara menyeluruh; 3). Usaha mencari rizki hukumnya mubah/ halal; 4). Nilai-nilai luhur harus mendominasi semua interaksi yang terjadi antar individu di tengah-tengah masyarakat.(Yasin, 2018)

Sebuah sistem ekonomi terdiri dari unsur-unsur yakni: manusia sebagai subyek, barang-barang ekonomi sebagai suatu obyek, dan seperangkat kelembagaan yang mengatur serta cara mengaitkan terhadap kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan tersebut mencakup lembaga-lembaga ekonomi yang formal atau tidak formal, cara kerja, dalam mekanisme hubungan, hukum serta peraturan-peraturan perekonomian, dan kaidah atau norma-norma lain, baik yang tertulis atau tidak. Aturan-aturan tersebut telah ditetapkan oleh masyarakat pada tatanan kehidupan berlangsung. Jadi dalam perangkat kelembagaan ini masuk pada kebiasaan, perilaku, serta etika masyarakat.(Budiman, 2019)

Hal-hal tersebut diterapkan di berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya agar mencakup kebutuhan. Sistem ekonomi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negeri dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Lembaga atau institusi ekonomi dalam hal ini ialah pedoman, aturan maupun kaidah yang digunakan individu atau kelompok orang dalam melaksanakan kegiatan ekonominya, yaitu dalam melakukan produksi, distribusi serta konsumsi pada barang maupun jasa. Terkait dengan hal ini, lembaga juga bisa dipahami sebagai produk tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Ketetapan MPR, Perda, AD ART suatu organisasi dan lain-lain. Di samping itu, lembaga juga bisa diartikan sebagai produk tidak tertulis dalam kebiasaan, adat istiadat, cara-cara yang biasa dilaksanakan oleh suatu masyarakat untuk melaksanakan produksi, distribusi dan konsumsi.(Zaini, 2021)

Kajian politik ekonomi Islam adalah hasil pengembangan dari hukum Islam dari bidang kebijakan pengelolaan kekayaan Negara (*attasharruf*). Secara teknis politik ekonomi Islam lebih dikenal dengan kata Siyasaḥ Maliyah. Istilah yang lain juga yakni Tadakhul *ad-daulah* (intervensi negara). Istilah ini dibangun oleh -Muhammad Baqir AshShadr yang menurut beliau Negara mengintervensi kegiatan ekonomi memiliki tujuan agar menjamin adaptasi hukum Islam yang tentang aktifitas ekonomi pada masyarakat secara menyeluruh. negara dipandang berpartisipasi dan ekonomi Islam menyesuaikan dalil-dali yang ada pada nash. (Purwana, 2014)Sistem ekonomi Islam ialah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran serta nilai-nilai Islam, bersumber dari al-Quran, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Sistem ekonomi Islam memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis, sistem ekonomi Islam mempunyai sifat baik dari sistem ekonomi sosialis maupun kapitalis, tetapi terlepas dari sifat buruknya. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang tidak lahir dari hasil akal manusia, namun sebuah sistem yang berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an majupun Hadits yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat serta ahli pada bidangnya. Karakteristik ekonomi Islam memiliki perbedaan yang mendasar terhadap sistem ekonomi yang lain, yakni dimana pada sistem

ekonomi Islam memiliki nilai moral serta nilai ibadah di setiap kegiatannya. Prinsip ekonomi Islam meliputi: kebebasan individu, hak terhadap harta, kesamaan sosial, keselamatan sosial, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap institusi anti-sosial, dan kebajikan individu dalam masyarakat.(Mu'min, 2015) Studi ekonomi politik tidak bisa terlepas dari mengenai perilaku seseorang dalam menentukan pilihannya secara rasional dan religiusitas. Sehingga ekonomi politik sebagai pelaku kegiatan ekonomi serta politik yang tidak bisa dipisahkan dari *mabda* yang dianut oleh sebuah negara.(Qomar, 2005)

B. Perekonomian Negara dalam Ekonomi Politik Islam

Menurut ilmu ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam perekonomian. Para ulama maupun pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah sudah membahas peran penting negara dalam perekonomian, Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara mempunyai kekuasaan yang paling luas untuk melakukan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwasanya tugas itu dilakukan melalui cara demokratis serta adil, yakni dimana semua keputusan diambil setelah bermusyawarah secukupnya dengan para wakil rakyat yang sebenarnya. Walaupun dalam hal ini Islam memberikan peran terhadap negara secara luas, hal ini bukan berarti bahwasanya konsep ekonomi Islam mengabaikan kebebasan individu. Kebijakan regulasi pada ekonomi politik lebih mengedepankan dalam menanggung manfaat atas regulasi. Dalam hal ini negara bagaimana pemerintah mempersiapkan mekanisme dari para pelaku pasar. Perbedaan sistem politik-ekonomi pada suatu negara dengan lainnya terdapat pada faktor-faktor ekonomi dalam pandangan hidup bangsa, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, dan kebudayaan masyarakat. Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri namun berhubungan dengan falsafah, pandangan dunia dan gaya hidup masyarakat tempatnya dalam berpijak. Konsep dasar yang memberikan warna bagi semua kehidupan umat muslim adalah tauhid. Terkait dengan konsep ini, Chapra menyatakan bahwa *“On this concept rests its whole worldview and strategy. Everything else logically emanates from it...”* Menjadi seorang umat muslim berarti meyakini ketawhidan Allah serta menghadirkan Allah pada setiap perilakunya. Sehingga dapat diketahui bahwasanya ketawhidan yakni prinsip dasar terhadap sistem ekonomi politik Islam. Secara bahasa, kata “muslim” merupakan orang yang telah menundukkan diri kepada Allah. Dengan penundukan diri tersebut, semua aspek kehidupan seorang muslim wajib merujuk pada kehendak Allah SWT.(Syairozi, 2017)

Sehingga cara pandang dunia Islam sebagaimana diungkapkan tersebut menjadi suatu pembeda dengan lainnya. Misalkan, ekonomi konvensional memposisikan agama dalam wilayah yang berbeda sama sekali serta tidak bisa disentuh oleh wilayah lain yang berhubungan tersebut dengan persoalan kemanusiaan serta alam semesta yakni wilayah ekonomi. Konsep ekonomi Barat memandang agama tidak mempunyai keterikatan dengan materi ekonomi seorang manusia. Oleh sebab itu, materi ialah standar rasionalitas dalam definisi ilmu ekonomi sekuler, yang oleh Adam Smith yang kemudian dilanjutkan oleh Alfred Marshall diformulasikan sebagai suatu kesejahteraan pada masyarakat. Sistem politik-ekonomi sebenarnya ialah salah satu unsur dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam kegiatan dari kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat di sebuah negara.(Sadr, 2018)

Tabel 1. Sistem Ekonomi Politik dalam pandangan sebuah Negara

Sifat Dasar	Kapitalisme	Sosialisme	Komunisme	Islam
Kepemilikan Faktor Produksi	Individu	Industri dasar dimiliki negara sisanya individu	Seluruhnya dimiliki negara	Industri dasar dikuasai negara, sisanya individu
Inisiatif pembentukan	Individu, Partnership,	Usaha Bersama pada industri	Negara	Negara dan Individu (profit

badan usaha	Korporasi	dasar dan individu lainnya		and loss sharing)
Inisiatif Ekonomi	Keuntungan sebagai motif utama	Motif ekonomi dan non ekonomi	Insentif terbatas	Profit dan non-profit (religiusitas)
Mekanisme harga Kompetisi	Pasar (<i>supply & demand</i>) eksis	Pemerintah, birokrasi	Negara, Tidak ada	Hukum pasar dan birokrasi, Eksis
Struktur organisasi Inisiatif kegiatan	Desentralisasi, Matrealistik	Semi desentralisasi, Sosialistik	Sentralisasi penuh, Untuk ideologi	semi desentralisasi gabungan

Sumber: (Sadr, 2018)

Paradigma politik-ekonomi yang dianut berbagai negara sekarang tidak menyinggung peran negara ataupun mengenai kebijakan sebagai alatnya. Sehingga hal ini bisa dipahami mengenai kajian ekonomi politik konvensional yang muncul dari perspektif kapitalisme, yang mana idealnya negara tidak berperan secara langsung dalam mengatur perekonomian rakyat.

C. Hubungan Negara dan Politik Perekonomian

Teori peranan negara yang berkembang dalam sistem ekonomi Islam tidak dapat disamakan dengan bentuk “campur tangan” minimal yang mengarah kepada kapitalisme *laissez faire*. Demikian juga, intervensi tidak dilakukan dalam bentuk kolektivisme dan regimentasi yang menindas kebebasan dan melemahkan motivasi dan usaha individu sebagaimana dalam sosialisme. Peranan utama negara, dengan demikian adalah dalam mengupayakan restrukturisasi hak-hak properti pribadi serta dalam menjamin standar hidup minimum seluruh individu dalam masyarakat. Sistem kebijakan merupakan produk subyektif manusia yang terwujud dengan pilihan-pilihan sadar oleh para pelaku kebijakan. Sistem kebijakan ialah realitas obyektif yang dimanifestasikan terhadap tindakan-tindakan yang teramati sekaligus konsekuensinya. Para pelaku kebijakan yakni produk dari sistem kebijakan. Dalam ekonomi Islam tiga komponen itu baik pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan atau kebijakan publik itu sendiri wajib berpedoman kepada syariah. (Hamzah, 2017)

Politik sebagai publik bermakna bahwa output dari politik selalu menjadi urusan bersama. Ini berbeda dengan ekonomi yang selama ini berkonotasi individual. Hipotesa yang digunakan dalam hal ini adalah bahwa ekonomi dan politik sejak awal memiliki asumsi yang berbeda, sehingga menggabungkan analisis ekonomi serta politik secara bersamaan dalam ekonomi politik konvensional yakni upaya yang tidak berhasil dengan baik. Berbeda dengan pendekatan tersebut, dalam politik ekonomi dalam Islam adalah jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (*al-hajat al-assiyah*) bagi setiap orang dan juga pemenuhan berbagai keperluan sekunder atau tersier (*al-hajat al-kamaliyyah*) sesuai kadar kemampuan individu dalam masyarakat tertentu dengan kekhususan di dalamnya. Penekanan kemakmuran individu pada pemahaman tersebut menunjukkan bahwa titik berat sasaran pemecahan permasalahan ekonomi Islam yakni terletak pada permasalahan individual bukan komunal dalam tingkat nasional. (Ramadhan, 2018) Secara umum, prinsip-prinsip kebijakan ekonomi politik Islam terdiri dari empat hal, yakni:

1. Setiap warga negara dipandang mempunyai hak yang sama dalam hal memenuhi kebutuhan.
2. Dalam memenuhi kebutuhan pokok dilakukan dengan menyeluruh.
3. Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dengan maksud dalam mendapatkan kekayaan serta meningkatkan kemakmuran hidupnya.

4. Dasar-dasar syariat wajib diimplementasikan dalam semua interaksi yang melibatkan individu dalam masyarakat. (Ahmad Dahlan, 2019)

Sehingga poin di atas tersebut bahwasanya ekonomi politik kapitalisme memiliki perbedaan dengan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam yakni kebijakan negara dalam menjamin semua keperluan dasar rakyat tercukupi, baik individu, dengan menyeluruh, dan menjamin kesempatan untuk mencukupi keperluan sekunder sesuai dengan kadar yang bisa diraih sebagai manusia yang hidup pada suatu masyarakat yang khusus, melalui corak serta gaya hidup yang unik. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan dalam negara lebih fokus terhadap kesejahteraan orang-perorang maupun umum dengan menyeluruh kesejahteraan pada negara. Akan tetapi kenyataannya masih banyak kasus kelaparan serta kemiskinan. (Jaelani, 2012)

Pada politik ekonomi Islam terdapat jaminan bagi setiap orang yang hidup di dalam daulah islamiyah untuk memenuhi keperluan primernya. Dalam hal ini Negara mendorong serta memetakan agar setiap laki-laki yang memiliki kemampuan dalam usaha serta bekerja untuk mendapatkan rezeki. Sehingga hal ini harus dapat mengakses pasar. Negara menerapkan syariah supaya mengatur semua interaksi di tengah masyarakat dan menjamin pembentukan nilai maupun norma keutamaan serta keluhuran pada setiap interaksi, termasuk dalam interaksi ekonomi. (Dirwan, 2015)

Dalam sistem ekonomi-politik Islam, zakat menjadi salah satu instrumen pengaman sosial (*social security*). Sebab hal ini menjadi bagian dari sebuah sistem yang terintegrasi dari program jaminan menuju akses pasar terhadap golongan miskin. Fungsi zakat ini tidak akan optimal tanpa sentuhan dari negara. Oleh karena itu dalam berbagai literatur mengenai keuangan publik klasik, zakat diklarifikasikan sebagai salah satu sumber penting pendapatan negara sebagai alat pengeluaran publik. Sehingga tugas utama menjamin kesejahteraan seseorang tentang persoalan sumber daya alam serta kekayaan negara merupakan mengembangkan beberapa kebijakan yang berpusat pada kesejahteraan secara umum. Islam berupaya menggabungkan inisiatif pribadi dengan intervensi pemerintah untuk mencapai memiliki keseimbangan sosial. Peranan utama negara, sehingga demikian dalam mengupayakan restrukturisasi hak-hak properti pribadi dalam dalam menjamin standar hidup minimum untuk seluruh individu pada masyarakat. (Hasan & Amin, 2019)

4. KESIMPULAN

Epistemologi dalam kajian politik-ekonomi Islam merupakan mabda' Islam itu sendiri. Sebab ilmu tidak muncul dari ruang "hampa budaya." Ia lahir dari budaya yang memiliki pandangan tertentu. Sehingga konsekuensinya dari ekonomi Islam bukan dibesarkan melalui mengadopsi epistemologi ekonomi konvensional, sebab hal ini mengingat masing-masing mempunyai identitas atau pandangan sendiri. Semua peradaban serta agama mengalami proses meminjam serta memberi persinggungan dalam sepanjang sejarah, hal ini tidak mungkin untuk bersikap eksklusif. Dalam persinggungan melalui budaya asing itu bukan menafikan identitas pandangan sendiri, hal ini dibutuhkan pembenahan epistemologi keilmuan yang menyeluruh. Pendekatan untuk menyelesaikan sebuah persoalan besar tersebut wajib berawal dari pembenahan epistemologi ilmu pengetahuan. Dalam bidang ekonomi politik Islam, rekonstruksi epistemologi tersebut yakni dengan memasukkan nilai-nilai serta etika yang diambil dari pandangan dunia Islam, kepada korpus ekonomi mainstream. Dalam mereaktualisasikan ketentuan Islam mengenai ekonomi politik ini membutuhkan perubahan dalam mempertimbangkan keadaan sosial sejarah sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab. Tujuan negara dalam perekonomian melalui kebijakan publik Islam yakni agar keterjaminan dalam memenuhi kebutuhan pokok setiap warga negara. Politik ekonomi inilah

yang menjadi suatu garis dasar kebijakan fiskal Islam serta akan sangat terlihat pada fungsi alokasi maupun distribusi. Politik ekonomi Islam memberikan daya tawar positif bagi percepatan pembangunan ekonomi melalui kemitraan usaha dengan kalangan usaha kecil dan menengah. Pemberdayaan ekonomi syariah melalui kemitraan usaha antara lembaga keuangan syariah dan usaha kecil menengah dengan mengembangkan kegiatan usaha sektor riil dalam bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa dan lembaga keuangan syariah. Pertumbuhan praktik ekonomi Islam di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat setelah mendapat dukungan pemerintah dalam bentuk politik ekonomi yang berprinsipkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat terlihat dalam berbagai bidang ekonomi yang menerapkan sistem ekonomi Islam, seperti perbankan Syariah, asuransi Syariah, sukuk, pasar modal Syariah, keuangan publik, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dahlan, M. S. I. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam: Kajian Teologis, Epistemologi, dan Empiris*. Prenada Media.
- Budiman, I. (2019). Epistimologi Ilmu Ekonomi Islam Analisis Perspektif Filsafat Ilmu. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 141–150.
- Dirwan, D. (2015). *Kelangkaan, Teori Nilai Dan Teori Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Terhadap Ekonomi Politik Kapitalisme)*.
- Fauroni, R. L. (n.d.). *Penguatan Konstruksi Ilmu Ekonomi Islam Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi; Perspektif Epistemologi*.
- Hamzah, S. S. A. (2017). Evaluasi Epistemologi Ekonomi Barat Dan Islam Dalam Tinjauan Iqtishâd. *At-Tafkir*, 10(1), 16–37.
- Hasan, N. F., & Amin, M. (2019). Politik Ekonomi Islam (Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Penentuan Anggaran Belanja Negara). *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1), 401–412.
- Irkhami, N. (2016). Intervensi Negara Dalam Perekonomian: Melacak Epistemologi Politik-Ekonomi Islam. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(2), 485–503.
- Jaelani, A. (2012). *Pengelolaan APBN dan Politik Anggaran di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Junaidi, H., & Zainuddin, C. (2017). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal. *Jurnal Muamalah*, 3, 1–14.
- Mu'min, M. (2015). Analisis Pemikiran Fzalur Rahman Tentang Aspek Epistemologi Ekonomi Islam. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 8(2), 91284.
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 11(1), 21–42.

- Qomar, M. (2005). *Epistemologi pendidikan Islam: dari metode rasional hingga metode kritik*. Erlangga.
- Ramadhan, M. (2018). *Politik Ekonomi Islam Dalam Narasi Pembangunan Nasional*. LKiS.
- Rozalinda, R. (2015). Epistemologi Ekonomi Islam dan Pengembangannya pada Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–28.
- Sadr, M. B. (2018). *Basis Epistemologi Ekonomi Islam*.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Syairozi, M. I. (2017). Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia dalam Prespektif Filsafat Ilmu (Sebuah Kajian Epistemik). *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)*, 2(1), 16-Halaman.
- Yasin, M. N. (2018). *Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia*. UIN Maliki Press.
- Zaini, A. A. (2021). Ekonomi Islam dalam Konsep Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1), 42–50.